



Surabaya

DABM  
SURABAYA

# 2025 PENGARUSUTAMAAN GENDER

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA  
KOTA SURABAYA



**PROFIL**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA**  
**KOTA SURABAYA**  
**TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
I.1    Latar Belakang.....	I-1
I.2    Landasan Hukum.....	I-1
I.3    Tujuan Penyusunan Profil PUG.....	I-3
BAB II PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG.....	II-1
BAB III PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH.....	III-1
BAB IV TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA.....	IV-1
BAB V INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA .....	V-1
BAB VI    PENUTUP .....	V-5

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang merupakan konsep yang sangat penting dalam memahami dan mengatasi kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia, isu gender masih menjadi perhatian serius karena adanya disparitas antara Laki-laki dan Perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan Keputusan, dan kesempatan untuk berkembang. Kesenjangan Gender ini seringkali berdampak pada kualitas hidup Perempuan dan kelompok marginal lainnya, sehingga perlu dilakukan Upaya untuk meningkatkan responsivitas gender dalam berbagai kebijakan dan program Pembangunan.

Pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **I.2 Landasan Hukum**

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan

Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
8. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 72);
9. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pada Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 81);

10. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 80);
11. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
12. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.
13. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
14. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya.

### **I.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG**

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (good practise) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2025

4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2026
5. Menganalisis Tingkat responsivitas gender dalam kebijakan dan program kegiatan Perangkat Daerah, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi responsivitas gender tersebut.

## **BAB II**

### **PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG**

#### **2.1 Gambaran Umum**

Pembentukan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga menyelenggarakan urusan pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Air Limbah, Drainase dan Jalan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya maka struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Keuangan;
  2. Ketua Tim Kerja Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengadaan Tanah Dan Pemanfaatan Infrastruktur, membawahi:
  1. Ketua Tim Kerja Pengadaan Tanah Infrastruktur;
  2. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Infrastruktur;
  3. Ketua Tim Kerja Layanan Rekomendasi Teknis, Monitoring dan Pengamanan Infrastruktur.
- d. Bidang Pengelolaan Sarana Dan Prasarana, membawahi:
  1. Ketua Tim Kerja Operasional Sarana Drainase;
  2. Ketua Tim Kerja Operasional Alat Angkut;
  3. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Air Limbah Domestik.



e. Bidang Drainase, membawahi:

1. Ketua Tim Kerja Perancangan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Drainase;
2. Ketua Tim Kerja Pembangunan Sarana Dan Prasarana Drainase;
3. Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Prasarana Drainase.

f. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahi:

1. Ketua Tim Kerja Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
2. Ketua Tim Kerja Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
3. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan.

g. UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik

## 2.2 Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 04 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya, visi Kota Surabaya tahun 2021-2026 adalah **“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”**.

Adapun misi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 meliputi:

### 1. Misi 1

Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.

### 2. Misi 2

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya.

### 3. Misi 3

**Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.**

4. Misi 4

Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

5. Misi 5

Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya, khususnya pada misi ke 3 (tiga), Dinas Sumber Daya Air dan Bina berkomitmen dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja, yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas sebagai penerima amanah.

Penjabaran misi yang diamanatkan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang juga sebagai sasaran kota adalah **Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai. Adapun sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga kaitannya dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
2. Penyediaan sistem drainase perkotaan yang terintegrasi dan efektif dengan indikator sasaran Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional.
3. Meningkatkan konektivitas jalan antar wilayah dengan indikator sasaran yang terdiri dari Tingkat konektivitas jalan terbangun, dan Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki.

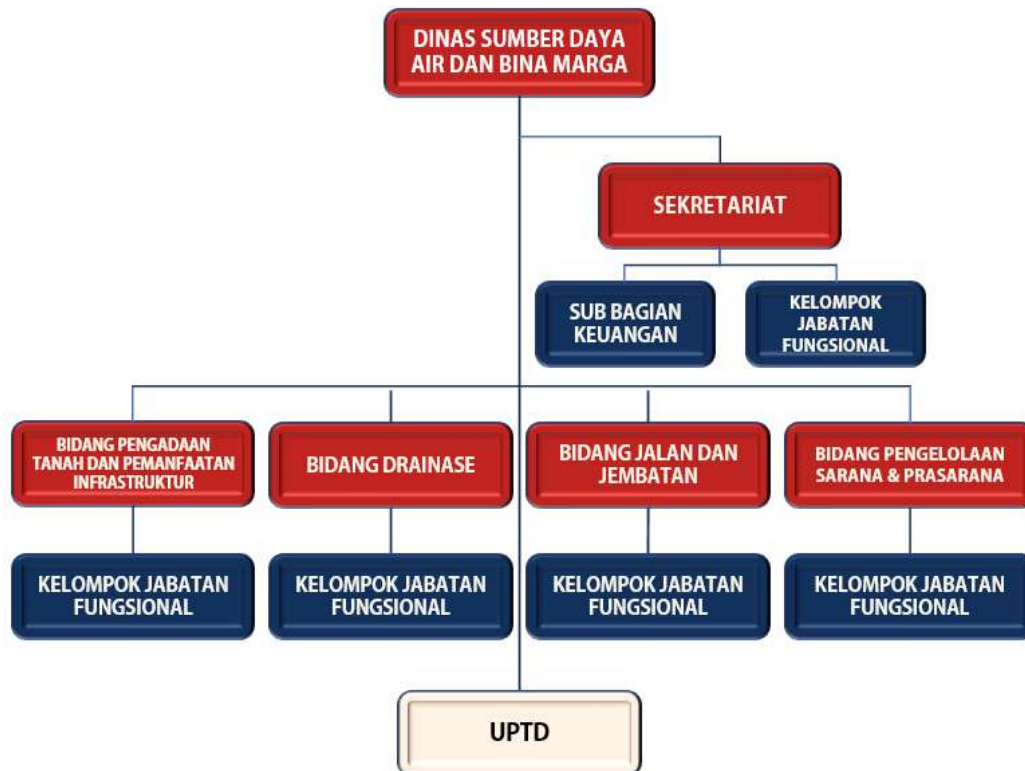
Mewujudkan pelayanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi dengan indikator sasaran Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi.

## 2.3 Demografi

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga terletak di Jalan Jimerto No.6-8, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya. Mengacu pada peraturan-peraturan tersebut, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase dan Jalan. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut.



Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sesuai Lampiran Peraturan Walikota Surabaya

Pembagian Tugas dan Fungsi masing - masing Bidang berdasarkan peraturan diuraikan sebagai berikut:

1. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator.

2. **Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengadaan tanah dan pemanfaatan infrastruktur yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan

kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator.

- 3. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana,** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator.

- 4. Bidang Drainase,** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang drainase yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Drainase dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator.

- 5. Bidang Jalan dan Jembatan,** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bidang Jalan dan Jembatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan

evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator

**6. UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam pengelolaan limbah domestik.

Pelaksanaan tugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dengan konsentrasi kegiatan pada perencanaan – pelaksanaan – pengawasan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase dan Jalan membutuhkan kompetensi keahlian dan keterampilan secara umum dengan kualifikasi teknis dibantu oleh staf administrasi, teknisi dan operator. Adapun rincian pegawai di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga adalah sebagai berikut:

**A. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2025**

Total Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga pada akhir tahun 2025 adalah 208 orang. Dengan rincian jumlah pegawai sebagai berikut:

- Sekretariat memiliki jumlah pegawai 20 orang
- Bidang Jalan dan Jembatan memiliki jumlah pegawai 30 orang
- Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur memiliki jumlah pegawai 25 orang
- Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana memiliki jumlah pegawai sebanyak 13 orang
- Bidang Drainase memiliki jumlah pegawai sebanyak 114 orang
- UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik memiliki jumlah pegawai sebanyak 6 orang.

**B. Tenaga Non ASN Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tahun 2025**

Total Tenaga Non ASN Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tahun 2025

sebanyak 1979 orang. Dengan rincian jumlah pegawai sebagai berikut:

- Sekretariat memiliki jumlah pegawai 53 orang
- Bidang Jalan dan Jembatan memiliki jumlah pegawai 317 orang
- Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur memiliki jumlah pegawai 14 orang
- Bidang Pengelolaan Saran dan Prasarana memiliki jumlah pegawai sebanyak 81 orang
- Bidang Drainase memiliki jumlah pegawai sebanyak 1482 orang
- UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik memiliki jumlah pegawai sebanyak 32 orang.

## 2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

### 2.4.1 Kebijakan

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tertuang dalam:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya;
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya;
- c. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya No. 400.2/115/436.7.3/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.

### 2.4.2 Sosialisasi PUG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dibutuhkan

internalisasi berupa Sosialisasi Terkait Penerapan Pengarusutamaan Gender serta Penyusunan Laporan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) kepada pegawai di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Pada tahun 2025. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 28 April 2025, dengan pokok bahasan berupa pengenalan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) serta dokumen pelaporan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) pada beberapa sub kegiatan di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang responsif gender. Sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka di Ruang Rapat Boezem Aquatik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang dihadiri oleh para pegawai dari setiap bidang yang ada di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

Dokumen dapat diakses pada [https://drive.google.com/file/d/1xggZeA9NC75TY43LZST8DNGuPvIE5WyF/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1xggZeA9NC75TY43LZST8DNGuPvIE5WyF/view?usp=drive_link)

A. Sumber Daya Manusia yang terlatih PUG di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yaitu:

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Korviantika Cahyaning Setiawati, S.T.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	Pelatihan
2	Bagio Iskandar	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pelatihan
3	Moch Ismail Hidayat, SE	Arsiparis	Pelatihan

B. Focal Point PUG

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya Walikota Surabaya, menyatakan bahwa Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian merupakan Focal Point PUG pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.



### C. Tim Focal point PUG

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya Nomor : 400.2/115/436.7.3/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya, maka Adapun daftar susunan Tim Focal Point PUG adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Syamsul Hariadi, S.T., M.T.	Pembina	Kepala Dinas
2	Mohamad Iman Rachmadi, S.T.	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Korviantika Cahyaning Setiawati, S.T.	Sekretaris	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
4	Akhrimatul Bariyah, S.T.	Koordinator	Kepala Sub Bagian Keuangan
5	Indah Nur Hayati, S.E., M.T.	Koordinator	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur
6	Siti Aisyah, S.T., M.AP.	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
7	Yulia Savitri, S.T., M. PSDM.	Anggota	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
8	Yuyun Istianah, S.T.	Anggota	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
9	Tri Broto Santoso, S.T.	Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana
10	Franki Yuanus, S.E.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
11	Andi Candra Septaprasetya, S.T., M.T.	Anggota	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
12	Cynthia Dyah Puspitasari, S.T.	Anggota	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
13	Windo Gusman Prasetyo, S.T., M.Si.	Koordinator	Kepala Bidang Drainase
14	Candra Andi Wijaya Supriyadi, S.T.	Anggota	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
15	Achmad Idi Pratiknyo, S.T.	Anggota	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
16	Adi Gunita, S.T., M.T.	Koordinator	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
17	Mochammad Erfan Hadi, S.T.	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
18	Novrizal Dwi Lestiawan, S.T.	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
19	Agus Yudiwibowo, S.T., M.T.	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
20	Bagio Iskandar	Pelaksana	Staff Sekretariat
21	Ika Pramita Octaviani, S.T.	Pelaksana	Staff Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur
22	Diah Fatmaningwati, S.T.	Pelaksana	Staff Bidang Jalan dan Jembatan
23	Sumarno, S.T.	Pelaksana	Staff Bidang Drainase
24	Andriyani Kristina, A.Md.	Pelaksana	Staff Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

#### 2.4.3 Data Terpilah dan Sistem Publikasinya

##### 1. Jumlah Sumber Daya Manusia

No.	JENIS KETENAGAAN	USIA	NON ASN		ASN		JUMLAH TOTAL	
			L	P	L	P	L	P
1	Kepala Dinas	53	0	0	1	0	1	0
2	Sekretaris	52	0	0	1	0	1	0
3	Ketua Tim Kerja Umum Dan Kepegawaian	41	0	0	0	1	0	1
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	40	0	0	0	1	0	1
5	Kepala Bidang Pengadaan Tanah Dan Pemanfaatan Infrastruktur	51	0	0	0	1	0	1

No.	JENIS KETENAGAAN	USIA	NON ASN		ASN		JUMLAH TOTAL	
			L	P	L	P	L	P
6	Ketua Tim Kerja Pengadaan Tanah Infrastruktur	44	0	0	0	1	0	1
7	Ketua Tim Kerja Layanan Rekomendasi Teknis, Monitoring Dan Pengamanan Infrastruktur	50	0	0	0	1	0	1
8	Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Infrastruktur	44	0	0	0	1	0	1
9	Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	57	0	0	1	0	1	0
10	Ketua Tim Kerja Operasional Alat Angkut	39	0	0	1	0	1	0
11	Ketua Tim Kerja Operasional Sarana Drainase	41	0	0	1	0	1	0
12	Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik	42	0	0	0	1	0	1
13	Kepala Bidang Drainase	40	0	0	1	0	1	0
14	Ketua Tim Kerja Perancangan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Drainase	48	0	0	1	0	1	0
15	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Prasarana Drainase	50	0	0	1	0	1	0
16	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan	40	0	0	1	0	1	0

No.	JENIS KETENAGAAN	USIA	NON ASN		ASN		JUMLAH TOTAL	
			L	P	L	P	L	P
17	Ketua Tim Kerja Perancangan Dan Pengawasan Jalan Dan Jembatan	49	0	0	1	0	1	0
18	Ketua Tim Kerja Pembangunan Jalan Dan Jembatan	46	0	0	1	0	1	0
19	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	52	0	0	1	0	1	0
20	Staff Sekretariat (ASN)	27 - 53		0	10	7	10	7
21	Staff Sekretariat (Non ASN)	21 - 53	37	16	0	0	37	16
22	Staff Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur (ASN)	30 - 55	0	0	19	2	19	2
23	Staff Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur (Non ASN)	25 - 45	10	4	0	0	10	4
24	Staff Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana (ASN)	27 - 56	0	0	9	1	9	1
25	Staff Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Non ASN)	22 - 64	77	4	0	0	77	4
26	Staff UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (ASN)	25- 57	0	0	4	1	4	1

No.	JENIS KETENAGAAN	USIA	NON ASN		ASN		JUMLAH TOTAL	
			L	P	L	P	L	P
27	Staff UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (non ASN)	25-57	31	1	0	0	31	1
28	Staff Bidang Drainase (ASN)	28 - 57	0	0	109	2	109	2
29	Staff Bidang Drainase (Non ASN)	21 - 69	1478	4	0	0	1478	4
30	Staff Bidang Jalan dan Jembatan (ASN)	28 - 68	0	0	23	3	2	3
31	Staff Bidang Jalan dan Jembatan (Non ASN)	24 - 54	308	9	0	0	300	9
<b>JUMLAH</b>			<b>1941</b>	<b>38</b>	<b>185</b>	<b>23</b>	<b>2126</b>	<b>61</b>

## 2. Jumlah Jejaring

### A. Jumlah jejaring wilayah kerja Bidang Drainase Tahun 2025

No.	WILAYAH	JUMLAH SDM				TOTAL		JUMLAH SASARAN KEGIATAN				TOTAL	
		L	%	P	%	L+P	%	L	%	P	%	L+P	%
1	Drainase Rayon Tandes	142	100%	0	0	142	11%	198.998	49,54%	202.657	50,46%	401.655	13,31%
2	Drainase Rayon Benowo	110	100%	0	0	110	8%	87.580	50,04%	87.426	49,96%	175.006	5,80%
3	Drainase Rayon Gubeng	234	100%	0	0	234	17%	524.418	49,67%	531.483	50,33%	1.055.901	34,99%
4	Drainase Rayon Jambangan	117	100%	0	0	117	9%	187.263	49,11%	194.033	50,89%	381.296	12,64%
5	Drainase Rayon Wiyung	137	100%	0	0	137	10%	134.634	49,61%	136.748	50,39%	271.382	8,99%
6	Drainase Rayon Genteng	204	100%	0	0	204	15%	217.030	49,38%	222.492	50,62%	439.522	14,57%
7	Drainase Rayon Rungkut	140	100%	0	0	140	10%	144.394	49,35%	148.226	50,65%	292620	9,70%
8	Drainase Rayon URC (mengelola seluruh wilayah Kota Surabaya)	260	100%	0	0	259	19%	1.494.317	49,52%	1.523.065	50,48%	3.017.382	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>1344</b>		<b>0</b>		<b>1344</b>	<b>100%</b>	<b>1.494.317</b>		<b>1.523.065</b>		<b>3.017.382</b>	<b>100,00%</b>

B. Jumlah jejaring wilayah kerja Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2025

No.	WILAYAH	JUMLAH SDM				TOTAL		JUMLAH SASARAN KEGIATAN				TOTAL	
		L	%	P	%	L+P	%	L	%	P	%	L+P	%
1	Rayon Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Pusat	65	100%	0	0%	65	22%	171.315	49,41%	175.408	50,59%	346.723	5,75%
2	Rayon Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Utara	42	100%	0	0%	42	14%	301.629	49,99%	301.803	50,01%	603.432	10,00%
3	Rayon Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Timur	66	100%	0	0%	66	22%	397.898	49,25%	410.090	50,75%	807.988	13,39%
4	Rayon Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Selatan	36	97%	1	3%	37	13%	366.745	49,32%	376.905	50,68%	743.650	12,32%
5	Rayon Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Barat	60	100%	0	0%	60	20%	256.730	49,79%	258.859	50,21%	515.589	8,54%
<b>TOTAL</b>		<b>269</b>		<b>1</b>		<b>269</b>	<b>100%</b>	<b>1.494.317</b>		<b>1.523.065</b>		<b>3.017.382</b>	<b>100,00%</b>

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (MURNI)
1	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 70.845.352.524
2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp 353.128.225.994
3	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 250.672.021.627
4	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Rp 190.321.824.437
5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Rp 7.306.391.509
6	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Rp 9.210.978.232
7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 91.113.766.238
8	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp 9.229.012.098
9	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan	Rp 11.130.668.935
10	Pembangunan Jalan	Rp 414.412.327.305
11	Pelebaran Jalan Menambah Jalur	Rp 185.275.191.952
12	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Rp 780.733.786
13	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	Rp 1.413.022.096
14	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Rp 51.297.298.237
15	Penyediaan Sub sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	Rp 1.463.660.246
16	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp 5.676.665.577
<b>TOTAL ANGGARAN MURNI</b>		<b>Rp 1.652.496.407.007</b>

3. Data Sub Kegiatan Responsif Gender yang Masuk Laporan PPRG Tahun 2025



#### 4. Data Pencapaian Kinerja

No.	PROGRAM	SASARAN	TARGET		CAPAIAN		PENERIMA MANFAAT		JUMLAH	KETERANGAN
			absolut	%	absolut	%	L	P	L+P	
1	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Warga Kota Surabaya	30 Sistem Drainase Perkotaan	100%	30 Sistem Drainase Perkotaan	100%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Warga Kota Surabaya	10.000 meter	100%	2248 meter	22,48%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
3	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Warga Kota Surabaya	15 Sistem Drainase Perkotaan	100%	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
4	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Warga Kota Surabaya	15 Sistem Drainase Perkotaan	100%	6 Sistem Drainase Perkotaan	40,00%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Warga Kota Surabaya	50 Dokumen	100%	7 Dokumen	14,00%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
6	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Warga Kota Surabaya	15 Sistem Drainase Perkotaan	100%	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Warga Kota Surabaya	40 km	100%	101,44 km	253,60%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
8	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan	Warga Kota Surabaya	11,7 km	100%	0,81 km	6,92%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	Rencana target realisasi pada Bulan Agustus

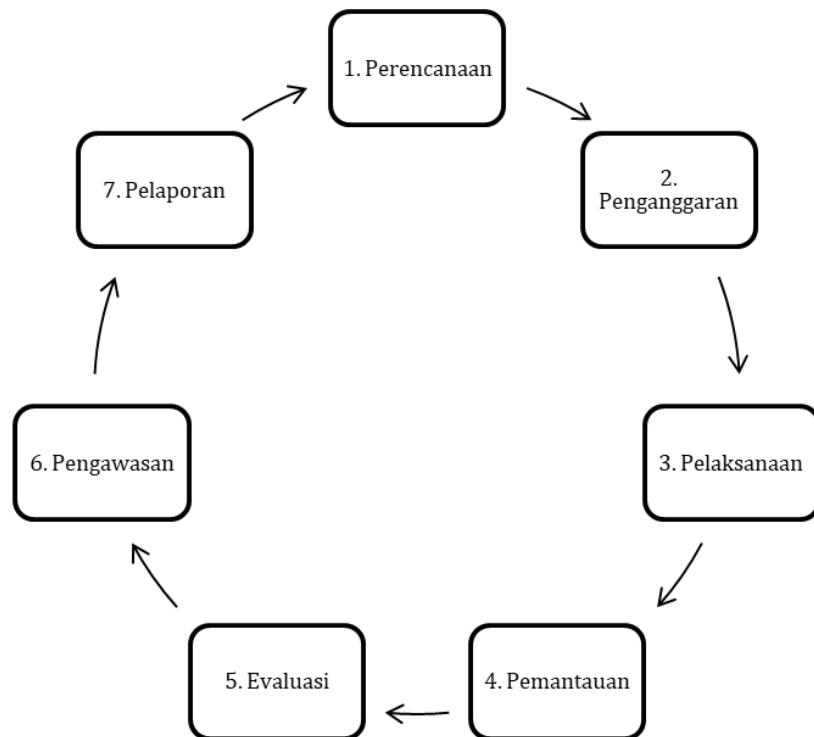
No.	PROGRAM	SASARAN	TARGET		CAPAIAN		PENERIMA MANFAAT		JUMLAH	KETERANGAN
			absolut	%	absolut	%	L	P	L+P	
	Kabupaten/Kota dan Desa									
9	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan	Warga Kota Surabaya	70 Dokumen	100%	92 Dokumen	131,43%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
10	Pembangunan Jalan	Warga Kota Surabaya	96 Unit	100%	72 Unit	75,00%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
11	Pelebaran Jalan Menambah Jalur	Warga Kota Surabaya	11,7 Km	100%	5,64 Km	48,21%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
12	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Warga Kota Surabaya	13 Unit	100%	12 Unit	92,31%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
13	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan	Warga Kota Surabaya	240 Unit	100%	160 Unit	66,67%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	

No.	PROGRAM	SASARAN	TARGET		CAPAIAN		PENERIMA MANFAAT		JUMLAH	KETERANGAN
			absolut	%	absolut	%	L	P	L+P	
	Strategis Kabupaten / Kota									
14	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Warga Kota Surabaya	290 Unit	100%	182 Unit	62,76%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
15	Penyediaan Sub sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	Warga Kota Surabaya	50 Rumah Tangga	100%	979 Rumah Tangga	1958%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	
16	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Warga Kota Surabaya	96 Unit	100%	64 Unit	66,67%	1.494.317	1.523.065	3.017.382	

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



### **3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling

terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

#### 1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

##### **a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG**

Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya No. 400.2/115/436.7.3/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.

Dokumen dapat diakses pada link:

<https://drive.google.com/file/d/12leerazQ9K9PyOtfpQtXtBDLIWWPkip7/view?usp=sharing>

##### **b. Renstra dan Renja Perangkat Daerah untuk PUG**

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga merupakan tinjauan dari dokumen perencanaan 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tahun 2021 – 2026 disusun untuk melaksanakan peraturan perundang–undangan serta menjabarkan visi, misi dan agenda pembangunan Walikota Surabaya dalam program/kegiatan organisasi mewujudkan sasaran–sasaran yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Dokumen dapat diakses pada link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1onnMJecSZ8uzj9clg\\_ZljGBCXXIpcxD2?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1onnMJecSZ8uzj9clg_ZljGBCXXIpcxD2?usp=drive_link)

**c. Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (GAP, GAB)**

Dokumen perencanaan penganggaran responsif gender yang terdiri dari dokumen GAB, dan GAB Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga disusun berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender yang dilaksanakan pada tahun 2025. Adapun sub kegiatan yang responsif gender di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebanyak 16 sub kegiatan, yang terdiri dari:

- Sub Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase;
- Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan;
- Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan;
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan;
- Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- Sub Kegiatan Pembangunan Jalan;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan;
- Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa;

- Sub Kegiatan Penyusunan, Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
- Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur;
- Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan strategis Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
- Sub Kegiatan Penyediaan Sub sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat
- Sub Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Dokumen dapat diakses pada link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Oi-X9crLH0Qbbh\\_9\\_9m7J\\_MD\\_MpsVWKz?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Oi-X9crLH0Qbbh_9_9m7J_MD_MpsVWKz?usp=drive_link)

#### **d. Hasil Analisis Gender**

Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Action Budget* (GAB). Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga telah menyusun dokumen GAP dan GAB pada 16 sub kegiatan yang responsif gender di tahun 2025.

Dokumen dapat diakses pada link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Oi-X9crLH0Qbbh\\_9\\_9m7J\\_MD\\_MpsVWKz?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Oi-X9crLH0Qbbh_9_9m7J_MD_MpsVWKz?usp=drive_link)

#### **e. Alat Analisis Gender**

Alat dan Teknik Analisis Gender yang digunakan adalah Model *Gender Analysis Pathway* (GAP). Komponen Utama Analisis Gender Model *Gender Analysis Pathway* (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu:

- Langkah ke-1 : Memilih kebijakan/ program/ kegiatan yang akan dianalisis
- Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpilih

menurut Jenis kelamin, baik kuantitatif maupun kualitatif

- Langkah ke-3 : Mengenali Isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat
- Langkah ke-4 : Menemukan dan kenali isu kesenjangan gender (internal)
- Langkah ke-5 : Menemukan dan kenali isu kesenjangan gender (eksternal)
- Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/Kegiatan dan rencana kedepan (reformulasi tujuan)
- Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi/kegiatan untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya
- Langkah ke-8 : Pengukuran hasil melalui data dasar (baseline)
- Langkah ke-9 : Indikator gender

## 2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki, bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran, dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan.

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b. Kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi-Misi Kota Surabaya tahun 2021-2026 yang selaras dengan dokumen:
  - RPJMD Kota Surabaya 2021-2026



- Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2021-2026
- Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2025
- Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya No. 400.2/115/436.7.3/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya
- *Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Action Budget (GAB).*

Dokumen dapat diakses pada link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1b-R2CFzTZc49gVs0wHoSdA8AgHXcyK67?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1b-R2CFzTZc49gVs0wHoSdA8AgHXcyK67?usp=drive_link)

Anggaran Responsif Gender di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (MURNI)</b>
1	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 70.845.352.524
2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp 353.128.225.994
3	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 250.672.021.627
4	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Rp 190.321.824.437
5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Rp 7.306.391.509
6	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Rp 9.210.978.232
7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 91.113.766.238
8	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp 9.229.012.098
9	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan	Rp 11.130.668.935
10	Pembangunan Jalan	Rp 414.412.327.305
11	Pelebaran Jalan Menambah Jalur	Rp 185.275.191.952
12	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Rp 780.733.786
13	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	Rp 1.413.022.096
14	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Rp 51.297.298.237
15	Penyediaan Sub sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	Rp 1.463.660.246
16	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp 5.676.665.577
<b>TOTAL ANGGARAN MURNI</b>		<b>Rp 1.652.496.407.007</b>

Total Anggaran Responsif Gender di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2025 adalah Rp 1.652.496.407.007 dari total anggaran sebesar Rp 1.793.647.044.506, maka persentase ARG Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebesar 92,13%.

### 3.2 Pelaksanaan

1. Program Pembangunan Berbasis Kewilayahan yang Mengintegrasikan Perspektif Gender
  - Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan pedestrian Kota Surabaya yang layak bagi ibu, anak dan disabilitas melalui kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota



- Pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase Kota Surabaya yang bermanfaat bagi seluruh warga Kota Surabaya melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota



- Pengoperasian dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang bermanfaat bagi seluruh warga Kota Surabaya melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.



## 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yang Responsif Gender

Tersedia beberapa sarana dan prasaran di kantor Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang responsif gender. Ketersediaan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mewujudkan keterwakilan ketersediaan fasilitas responsif gender maupun responsif kelompok rentan, adapun diantaranya yaitu:

1. Ruang pertemuan/tunggu (meeting point)
2. Kamar mandi laki-laki dan kamar mandi perempuan
3. Ruang laktasi
4. Ruang rapat
5. Mushollah

Dokumen dapat diakses pada link:

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SUcKYmJHIKBI4CZczzFAMN72h6sTtUR/edit?usp=drive\\_link&oid=100685514083397340173&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SUcKYmJHIKBI4CZczzFAMN72h6sTtUR/edit?usp=drive_link&oid=100685514083397340173&rtpof=true&sd=true) **Pembinaan PUG Perangkat Daerah**

Pembinaan PUG di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penyusunan laporan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Dokumen dapat diakses pada link:

[https://drive.google.com/file/d/1TcQITvybOaUiJJyCHW2EQj9tkbuHsC9E/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1TcQITvybOaUiJJyCHW2EQj9tkbuHsC9E/view?usp=drive_link)

### **3.3 Pengawasan**

Pengawasan pelaksanaan PUG Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dilakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Mengingat pelaksanaannya juga bersentuhan dengan APBD, maka pengawasan ini juga memperhatikan arahan dari Tim Anggaran Perangkat Daerah yang berupa hasil pendampingan dari Inspektorat.

Dokumen dapat diakses pada link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1OorZiqMkgn8iLkDFICQL0qRr3HKf-zEI?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1OorZiqMkgn8iLkDFICQL0qRr3HKf-zEI?usp=drive_link)

### **3.4 Pelaporan**

Penyelenggaraan PUG di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.

Dokumen dapat diakses pada  
[link:https://drive.google.com/drive/folders/10RDPCNavfVUSXSm\\_DDiw\\_dLCISqMptOI?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/10RDPCNavfVUSXSm_DDiw_dLCISqMptOI?usp=drive_link)

## **BAB IV**

### **TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA**

#### **4.1 Analisa dan Kesimpulan**

Dalam menganalisis tantangan atau permasalahan perangkat daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya dalam penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), menggunakan metode Fishbone Diagram yang membagi permasalahan ke dalam beberapa kategori: Man, Material, Metode, dan Lingkungan.

#### **4.2 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran**

Tantangan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya adalah dari kurangnya keterampilan dan pengetahuan serta kesadaran dari seluruh pegawai, hal tersebut terjadi karena kurangnya pelatihan dan pemahaman pegawai tentang Pengarusutamaan Gender dan isu-isu gender.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan guna dapat menangani permasalahan yang ada terkait gender, salah satu diantaranya yaitu melalui rutin melakukan sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender terutama yang terkait dengan bidang pembangunan infrastruktur kepada seluruh pegawai di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Selain hal tersebut, pentingnya peran masyarakat dalam menyuarakan/memberikan aspirasi di dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan demi pembangunan Kota Surabaya yang lebih maju.



## **BAB V**

### **INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

#### **5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksana**

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain yaitu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Di banyak kota besar, transportasi umum belum sepenuhnya ramah disabilitas. Pengguna kursi roda sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses bus atau kereta karena kurangnya fasilitas ramah disabilitas. Implementasi undang-undang yang mewajibkan transportasi umum untuk menyediakan fasilitas akses yang memadai adalah Langkah penting untuk mengatasi isu ini.

Dalam menghadapi isu gender tersebut, terdapat strategi pendekatan dalam mengatasinya, yaitu melalui peningkatan infrastruktur kota. Memastikan fasilitas umum dan infrastruktur ramah disabilitas dan dapat diakses oleh semua orang dan semua golongan. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya telah menjalankan program pembangunan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada, yaitu melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan dari segi jalan, saluran drainase dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Adapun beberapa inovasi yang telah dilakukan antara lain:

##### **a. Bidang infrastruktur :**

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya
- Pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan dan perkotaan
- Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)



Program kegiatan pembangunan tersebut telah responsif gender dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Kota Surabaya. Kegiatan tersebut terlaksana melalui sub kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan, Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir, Pembangunan Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan desa, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Pelebaran Jalan menuju Standar, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) serta Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

b. Bidang ekonomi:

- Pelatihan dan pendampingan keluarga miskin dalam kegiatan padat karya Paving GePREK.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung pembangunan jalan lingkungan khususnya kebutuhan material paving dan tenaga kerja pemasangan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) / Keluarga Miskin yang terdampak pandemi Covid-19 untuk turut berkarya melalui peningkatan jalan lingkungan dengan pola GePREK. Dengan penerapan pola GePREK (Gotong Royong, Pemberdayaan Dan

Ekonomi Kerakyatan), pembangunan jalan lingkungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas jalan lingkungan sekaligus dapat meningkatkan perekonomian warga.

Peningkatan Jalan Lingkungan Berkelas Dunia dengan pola GePREK di Kota Surabaya merupakan Program Padat Karya diinisiasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya yang dimulai dengan proses pelatihan pembuatan paving yang diikuti oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) / Keluarga Miskin sampai dengan memfasilitasi MBR tersebut untuk pengurusan NIB, BPJS, pemberian modal, pembuatan akun e-katalog hingga pembelian serta memanfaatkan hasil produksi untuk pemeliharaan jalan lingkungan di Kota Surabaya.

Dengan pola GePREK diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dan semangat gotong royong antara Pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota dan mewujudkan warga masyarakat kota Surabaya yang maju dan sejahtera

- Tujuan : Kegiatan tersebut bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Surabaya, meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan lingkungan, membangun sinergi yang kuat antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, serta membangun adab gotong-royong dan pemberdayaan masyarakat untuk produksi material jalan lingkungan dan tenaga kerja pelaksana.
- Manfaat : Mengurangi angka keluarga miskin di Kota Surabaya, meningkatkan keterampilan dan pendapatan keluarga miskin sebagai alternatif usaha pasca pandemi covid-19, tumbuhnya

semangat kebersamaan dan gotong-royong diantara warga kota, Tercapainya *good governance*.



## **BAB VI PENUTUP**

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN, DIFABEL DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan, Difabel dan Layak Anak Tahun 2025.

Kepala Dinas Sumber Daya Air  
dan Bina Marga Kota Surabaya



SYAMSUL HARIADI, S.T., M.T.

Pembina Tk I / (IV/b)

197211032001121003